



MEGAWATI SOEKARNOPUTRI TIBA DI ITALIA

Presiden kelima RI yang juga Ketum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Sekretaris Jenderal Zayed Awarad for Human Fraternity 2024 Mohamed Abdelsalam (kiri) setibanya di Roma, Italia, Sabtu (16/12) malam. Megawati menghadiri rapat bersama tokoh dunia membahas nominasi pemenang Zayed.

Mantan Pengacara Donald Trump Diminta Kompensasi Rp2,2 T setelah Fitnah Petugas Pilpres

Juri pengadilan AS memerintahkan mantan pengacara Donald Trump membayar kompensasi kepada dua petugas pemilu yang dia fitnah atas kecurangan.

WASHINGTON(IM)- Mantan pengacara Donald Trump, Rudy Giuliani, diperintahkan oleh juri pengadilan di Washington, Amerika Serikat untuk membayar ganti rugi lebih dari US\$148 juta atau sekitar Rp2,2 triliun kepada dua mantan petugas pemilu di negara bagian Georgia yang dia fitnah atas kecurangan saat pemilihan presiden AS pada 2020. Giuliani memfitnah bahwa mereka membantu mencurangi pilpres 2020, saat Trump kalah dari Joe Biden.

dengan tambahan US\$75 juta untuk menghukum mantan Wali Kota New York itu atas perbuatannya, menurut keputusan juri pada Jumat (15/12). Menurut rincian CNBC, dari jumlah US\$73 juta akan dibagi sebesar US\$20 juta kepada masing-masing Moss dan Freeman atas kerugian emosional, dan masing-masing lebih dari US\$16 juta atas pencemaran nama baik. "Hari ini adalah hari yang baik. Seorang juri menjadi saksi atas apa yang dilakukan Rudy Giuliani terhadap saya dan putri saya dan meminta pertanggungjawabannya," kata Freeman kepada wartawan di luar gedung pengadilan, melansir dari Reuters.

Sebelum persidangan, seorang hakim federal memutuskan bahwa Giuliani bertanggung jawab atas pencemaran nama baik, pendendaan emosional yang disengaja, dan konspirasi sipil. Panel juri berunding selama lebih dari 10 jam untuk menentukan jumlah yang akan dibebankan kepada Giuliani, yang membantu mantan Presiden Trump mengajukan klaim palsu atas kecurangan pemilu 2020. Giuliani mengatakan dia akan mengajukan banding. "Absurditas angka tersebut hanya menggarisbawahi betapa tidak masuk akalnyanya seluruh proses persidangan ini," katanya kepada wartawan di luar gedung pengadilan. Putusan pengadilan diambil setelah kesaksian emosional dari kedua mantan petugas yang difitnah. Moss dan Freeman, sebagai warga AS berkulit hitam, menceritakan bagaimana mereka diserbu pesan rasis dan seksis, termasuk ancaman pembunuhan setelah Trump dan sekutunya menyebarkan klaim palsu bahwa mereka terlibat

dalam kecurangan pemilu. Giuliani, yang menolak memberikan kesaksian, setelah sidang mengatakan komentarnya "tidak ada hubungannya sama sekali" dengan ancaman yang diterima kedua perempuan tersebut. Dia sebelumnya berulangkali membuat klaim palsu bahwa video CCTV menunjukkan Moss dan Freeman telah menyembunyikan dan menghitung koper berisi surat suara ilegal di sebuah stadion bola basket di Atlanta yang digunakan untuk memproses pemungutan suara selama pemilu 2020. Michael Gottlieb, pengacara Moss dan Freeman, dalam pledoinya mengatakan Giuliani tidak berhak melempar dua pegawai negeri sipil tak bersalah ke hadapan massa dunia maya demi membatalkan hasil pemilu. "Giuliani pikir dia bisa lolos dengan membuat Ruby dan Shaye menjadi korban kecurangan pemilu, karena menurutnya mereka orang biasa saja dan bisa diabaikan," ujar Gottlieb. Sementara pengacara Gi-

uliani, Joseph Sibley, mengakui bahwa kliennya telah menimbulkan kerugian. Namun mengatakan hukuman yang diminta penggugat setidaknya US\$48 juta akan menjadi "bencana besar" bagi kliennya. Sebagai pembelaan, dia mengatakan kepada juri bahwa Giuliani adalah "orang baik", merujuk pada perannya sebagai wali kota New York setelah Serangan 9/11. "Rudy Giuliani tidak boleh didefinisikan oleh apa yang terjadi belakangan ini," kata Sibley dalam argumen penutupnya. Investigasi pemerintah AS menemukan bahwa Moss dan Freeman memproses surat suara secara sah dan benar dalam pilpres 2020. Pengacara kedua perempuan tersebut menuduh bahwa klaim yang dilyangkan terhadap kliennya adalah bagian dari konspirasi yang melibatkan Trump, tim hukumnya, dan media sayap kanan untuk membantu Trump menabur keraguan tentang pemilu dan membalikkan kealahannya dari Biden. ● tom

Pakistan Tolak Putusan Pengadilan India Soal Kashmir

PAKISTAN(IM)- Pakistan menolak keputusan pengadilan India mengenai status Jammu dan Kashmir. Sengketa dua wilayah tersebut tidak dapat diselesaikan berdasarkan hukum dalam negeri. Menteri Luar Negeri Jalil Abbas Jilani telah menulis surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja sama Islam (OKI), dan Uni Eropa (UE) untuk menarik perhatian mereka terhadap ketetapan Mahkamah Agung India baru-baru ini yang menguatkan keputusan pemerintah India. Berdasarkan hukum internasional, undang-undang domestik dan putusan pengadilan tidak dapat digunakan untuk menentukan status akhir dari wilayah sengketa yang diakui secara internasional. "Menteri Luar Negeri mengutuk tindakan melanggar hukum yang dilakukan pemerintah India dalam mengkonsolidasikan pendudukan mereka di IIOJK (Indian Illegally Occupied Jammu and Kashmir) dan penindasan terus-menerus terhadap hak-hak masyarakat Jammu dan Kashmir," katanya. Pekan lalu, pengadilan India menguatkan legalitas undang-undang yang disahkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi pada 2019 yang mencabut status wilayah Jammu dan Kashmir yang dikelola India sebagai negara bagian, serta status khususnya. "Tindakan ilegal dan sepihak yang dilakukan India pada 5 Agustus 2019, dan serangkaian langkah selanjutnya, ditujukan untuk mengubah struktur demografi dan lanskap politik

IIOJK. Tujuan yang jelas dari langkah-langkah yang melanggar hukum ini adalah untuk mengubah warga Kashmir menjadi komunitas yang tidak berdaya di tanah mereka sendiri," tulis diplomat terkemuka Pakistan. Ia juga menyebut keputusan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, khususnya Resolusi 122 (1957). "Dukungan terhadap tindakan India yang melanggar hukum ini tidak dapat mengesampingkan ketentuan dan ketentuan Dewan Keamanan PBB sebagaimana tercantum dalam resolusinya mengenai Jammu dan Kashmir," kata Jilani. Ia juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memastikan implementasi penuh resolusinya mengenai sengketa Jammu dan Kashmir. Kashmir sebagian dikuasai oleh India dan Pakistan dan diklaim oleh keduanya secara penuh. Sebagian kecil Kashmir juga dikuasai oleh Tiongkok. Sejak mereka dipisahkan pada 1947, kedua negara telah berperang tiga kali, 1948, 1965 dan 1971 dengan dua di antaranya terkait Kashmir. Beberapa kelompok Kashmir di Jammu dan Kashmir telah berperang melawan pemerintahan India demi kemerdekaan atau persatuan dengan negara tetangga Pakistan. Menurut beberapa organisasi hak asasi manusia, ribuan orang dilaporkan tewas dalam konflik di wilayah tersebut sejak 1989. ● tom

Moldova Ingin Segera Bergabung dengan Uni Eropa

CHISINAU(IM)- Presiden Moldova Maia Sandu berharap negaranya bisa segera bergabung dengan Uni Eropa (UE). Moldova membutuhkan Uni Eropa untuk membantu melawan dominasi Rusia. Uni Eropa sebelumnya telah setuju untuk membuka pembicaraan tentang keanggotaan baru dari Moldova dan Ukraina. Sandu selama ini mengancam invasi Rusia ke Ukraina dan menuduh Moskow merencanakan kudeta untuk menggulingkannya. "Ada dua ancaman utama terhadap keamanan nasional kita, kebijakan agresif Federasi Rusia terhadap negara kita secara keseluruhan dan korupsi yang sudah merusak di Moldova," katanya seperti dilansir dari Reuters, Minggu (17/12).

Sandu memiliki mayoritas perwakilan di parlemen Moldova. Dia ingin membawa Moldova lebih erat hubungannya dengan UE, Rumania, Amerika Serikat, dan NATO. Namun, Moldova akan tetap mempertahankan status netral yang diatur dalam konstitusinya dan, berbeda dengan Ukraina, tidak mencari keanggotaan NATO. Dokumen tersebut menyatakan bahwa strategi baru ini vital dalam konteks geopolitik saat ini untuk membatasi risiko yang dihadapi Moldova. "Jelas bahwa Federasi Rusia dalam waktu dekat tidak akan meninggalkan tindakan ancamannya terhadap Moldova," katanya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria

Zakharova menyebut sikap tersebut sebagai Russophobia. Dia mengatakan bahwa Moskow selalu menghormati kepentingan Moldova. Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov, mengkritisi keputusan UE untuk meluncurkan pembicaraan keanggotaan dengan Ukraina dan Moldova. Dia mengatakan bahwa kedua negara itu tidak memenuhi kriteria keanggotaan blok tersebut. Sekretaris Pers Kementerian Luar Negeri Moldova, Igor Zaharov, mengatakan komentar Peskov menunjukkan bahwa Moldova menjauh dari pengaruh Moskow. "Kami secara tegas bergerak menuju jalur Eropa. Ini tentu membuat politikus Rusia tidak senang atau bahkan marah," kata Zaharov. ● ans



FESTIVAL CETATEA LUI BUCUR DIADAKAN DI BUKAREST
Anggota band lagu dan tari tradisional menampilkan tarian beruang selama festival tradisi dan adat istiadat musim dingin "Cetatea lui Bucur" di Bucharest, Rumania, Sabtu (16/12).

Putin Dicalonkan Sebagai Kandidat Presiden Independen

MOSKOW(IM) - Para pendukung Presiden Rusia Vladimir Putin resmi mencalonkannya sebagai kandidat independen dalam pemilihan presiden tahun 2024. Dalam undang-undang pemilihan Rusia kandidat yang tidak dicalonkan partai wajib didukung kelompok yang setidaknya memiliki 500 anggota. Kandidat independen juga harus mendapatkan 300 ribu tanda tangan dukungan. Kelompok yang mencalonkan Putin termasuk pejabat tinggi dari Partai Persatuan Rusia yang berkuasa, aktor dan penyanyi terkenal, atlet dan tokoh-tokoh publik lainnya. "Siapa pun yang siap mendukung pencalonan Vladimir Vladimirovich Putin sebagai presiden Rusia, silakan memilih. Siapa yang mendukung?" kata Mikhail Kuznetsov, kepala komite eksekutif Front Rakyat dalam pertemuan kelompok tersebut, seperti dikutip dari Global News, Minggu (17/12). Front Rakyat merupakan koalisi politik yang didirikan pada 2011 oleh Putin. Setidaknya satu partai A Just Rusia yang memiliki 27 dari 450 kursi di parlemen atau Duma

bersedia mencalonkan Putin tahun ini. Namun kantor berita Rusia, RIA Novosti mengutip ketuanya Sergei Mironov yang mengatakan Putin akan maju sebagai kandidat independen dan akan mengumpulkan tanda tangan. Pekan lalu anggota parlemen Rusia menetapkan tanggal 17 Maret 2024 sebagai hari tempat pemungutan suara, satu langkah bagi Putin untuk menduduki masa jabatan kelaminya. Putin yang berusia 71 tahun melakukan reformasi konstitusional agar ia memenuhi syarat untuk mendapatkan dua kali masa jabatan enam tahun lagi setelah masa jabatannya saat ini berakhir tahun depan. Sehingga memungkinkannya untuk tetap berkuasa hingga 2036. Kontrol ketat terhadap sistem politik Rusia yang ia bangun selama 24 tahun berkuasa membuat hasil pemilihan umum hampir bisa diprediksi. Para kritikus yang dapat menjadi lawannya di pemungutan suara berada di penjara atau tinggal di luar negeri. Rusia juga telah melarang sebagian besar media independen. ● tom

Hong Kong Tawarkan Hadiah untuk Penangkapan Kritikus Asing

TIONGKOK(IM) - yang menjadi buronan Hong Kong mengutuk tawaran hadiah untuk informasi tentangnya dan empat rekan, menyebutnya sebagai bagian dari kampanye Tiongkok untuk mengintimidasi kritikus dan membungkam oposisi. Polisi Hong Kong pada Kamis mengumumkan hadiah besar untuk bantuan menangkap Frances Hui dan aktivis lainnya yang dituduh melakukan kejahatan keamanan nasional. "Pemerintah Hong Kong dengan sengaja mengumumkan hadiah besar secara mencolok untuk penangkapan aktivis luar negeri. Dan Upaya ini dimaksudkan untuk menciptakan efek merinding dalam masyarakat umum dan mengisolasi kami," kata Hui di Institut Hudson, sebuah lembaga pemikir di Washington. Hadiah senilai HK-\$1.000.000 (sekitar US\$-128.000), yang merupakan batch kedua hadiah yang ditawarkan oleh polisi Hong Kong untuk mengejar buronan, segera dikutip oleh Amerika Serikat dan Britania Raya, dengan London menyebutnya sebagai "ancaman terhadap demokrasi dan hak asasi manusia." Pejabat diplomat Amerika Serikat teratas, Antony Blinken, pada Jumat (15/12) mengutuk "represi lintas batas" Hong Kong dan "erosinya tradisi bangsa kota itu dalam menghormati supremasi hukum." "Kami sangat menentang segala upaya untuk mengintimidasi dan membungkam individu yang memilih menjadikan Amerika Serikat sebagai rumah mereka dan tidak akan ragu-ragu untuk membela mereka yang menjadi sasaran semata-mata karena menjalankan hak asasi manusia mereka," kata Blinken dalam sebuah pernyataan. Hui mengatakan bahwa dirinya sedang berduka atas meninggalnya neneknya, dan kesedihannya diperparah oleh ketidakmampuannya untuk menghadiri pemakaman di kampung halamannya. "Ini adalah salah satu hal

yang harus diterima dan dihadapi oleh banyak dari kami yang berada di pengasingan, yaitu peluang untuk tidak bisa menghabiskan waktu dan berada di sana untuk orang-orang yang memiliki arti besar dalam hidup kita," kata Hui, suaranya gemetar. Namun demikian, Hui berjanji untuk melanjutkan kampanyenya untuk memberlakukan sanksi terhadap pejabat di Hong Kong dan Tiongkok. "Saya mengajak masyarakat internasional, khususnya AS, Inggris, dan Australia, tempat tinggal para pencari hadiah, untuk melawan represi lintas batas PKT, campur tangan, dan pelanggaran hak asasi manusia internasional," katanya. Kelima aktivis tersebut melarikan diri dari Hong Kong setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang luas di pusat keuangan tersebut pada 2020 untuk meredam oposisi setelah protes demokrasi massal. Rekan-rekan Hui telah diidentifikasi sebagai Simon Cheng yang berbasis di Inggris serta Joey Siu, Fok Ka-chi, dan Choi Ming-da. Berbicara bersama Hui, Piero Tozzi, kepala kelompok pemantau Tiongkok di Kongres AS, juga mendesak pengenaan sanksi terhadap jaksa dan hakim di Tiongkok dan Hong Kong yang terlibat dalam penindasan. "Apa yang kita lihat bukanlah supremasi hukum, tetapi kekuasaan oleh hukum dan menggunakan hukum sebagai alat untuk melecehkan dan mengintimidasi serta melanggar hukum dasar itu," katanya. Beijing membela hadiah tersebut sebagai suatu keharusan dan mengancam Washington dan London. "Dengan memberi semangat kepada individu anti-Tiongkok yang merusak Hong Kong, Amerika Serikat dan Britania Raya mengekspos niat jahat mereka dalam merusak Hong Kong," kata juru bicara Kementerian luar negeri Tiongkok, Mao Ning, di Beijing. ● tom

Rezim Kim Bakal Tamat jika Korea Utara Berani Serang Nuklir AS

WASHINGTON(IM) - Gedung Putih kembali memperingatkan Korea Utara tentang nuklir. Setiap serangan nuklir terhadap Amerika Serikat, akan membuat rezim Kim Jong Un berakhir. Pernyataan bersama Kelompok Konsultasi Nuklir AS-Korea Selatan juga menegaskan kembali bahwa setiap serangan nuklir yang dilakukan Pyongyang terhadap Korea Selatan akan ditanggapi dengan respons yang cepat, luar biasa, dan tegas. Presiden AS Joe Biden juga telah mengeluarkan peringatan serupa dan tegas belum lama ini. Ia telah mengatakan, bahwa serangan nuklir apa pun yang dilakukan oleh Korea Utara akan berakhir pada akhirnya dari Pemerintahan Koryun yang "Amerika Serikat menegaskan kembali komitmennya yang teguh untuk memberikan pencegahan yang lebih luas terhadap Korea Selatan (Republik Korea) yang didukung oleh seluruh kemampuan AS termasuk nuklir," demikian pernyataan yang diterbitkan oleh Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat

Joe Biden telah mengeluarkan peringatan serupa dan tegas pada April. Biden mengatakan bahwa setiap serangan nuklir oleh Korea Utara akan mengakibatkan berakhirnya pemerintahan Pyongyang. Lima bulan sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin memperingatkan bahwa setiap serangan nuklir yang dilakukan Korea Utara terhadap AS atau sekutunya akan berarti "berakhirnya rezim Kim." Korea Utara tahun lalu mendeklarasikan dirinya sebagai negara dengan kekuatan nuklir. Korea Utara telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah menghentikan program nuklirnya, yang dianggap sebagai hal yang penting untuk kelangsungan hidup negara tersebut. Bulan Pyongyang menempatkan satelit mata-mata militer ke orbit. Sejak saat itu, Korea Utara mengklaim bahwa mata mereka di langit sudah menyediakan gambar-gambar situs militer utama AS dan Korea Selatan. ● tom